

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dimana Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Sarana Pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas Satuan Kerja.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas, fungsi, dan peranaannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kinerja lainnya yang sudah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2016 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2351/MENKES/PER/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

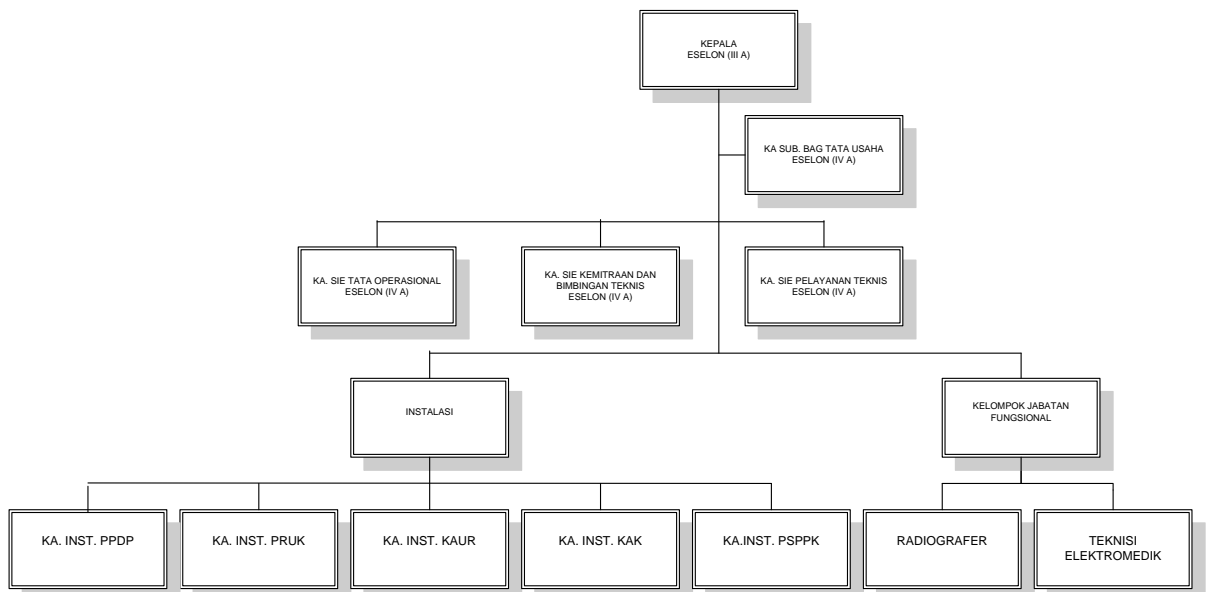
Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;

-
- d. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
 - e. Pengukuran luaran radiasi terapi;
 - f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan.
 - g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
 - h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;
 - j. Pelaksanaan ketatausahaan.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Struktur Organisasi



D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya tahun 2016 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya selama tahun 2016, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya disusun sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya, serta sistematika penyajian laporan.
- b. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya beserta anggaran yang akan direncanakan tahun 2016.
- c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2016, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya yang akan digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya selama tahun 2016.
- d. **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan tahun 2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja dibawah ini merupakan dasar bagi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Perencanaan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Perencanaan Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Terwujudnya cost effectiveness	1	Tingkat Kinerja Program	71	PPS
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2	Penilaian Kewajaran	A	Peringkat
3	Terwujudnya Kepuasan Pelanggan	3	Indeks Survey Pelanggan	71	Persen
		4	Ketepatan antrian pelayanan	65	Hari
4	Terwujudnya Cakupan Kalibrasi	5	Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan	560	Unit
5	Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan	6	Tingkat kelaikan alkes	95	Persen
6	Terpenuhinya Standar Internasional	7	Jumlah Lingkup akreditasi	27	Lingkup Akreditasi
		8	Penambahan Jenis layanan	67	Jumlah Alat

7	Terbinanya kemitraan dengan pelanggan	9	Jumlah Fasyankes Teredukasi	68	Jumlah
8	Terwujudnya Pemantauan Mutu Eksternal	10	Jumlah Peserta PME	12	Jumlah
9	Terwujudnya inovasi layanan	11	Jumlah Mitra Layanan	3	Jumlah
10	Terbangunnya budaya laboratorium yang unggul	12	Metode Kerja tervalidasi	50	Jumlah
		13	Rasio SDM berkinerja produktif	78	Persen
11	Terwujudnya kompetensi SDM	14	Kompetensi petugas pengujian dan kalibrasi	72	Persen
12	Terwujudnya sarana dan prasarana	15	Tingkat keandalan sarana prasarana	19	OEE
13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	16	Kematangan tata kelola TI	1	COBIT

B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-indikator, target dan pagu anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun 2015 dan 2016 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Tabel Perjanjian Kinerja

TAHUN 2016						TAHUN 2015					
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Terwujudnya cost effectivnes	1	Tingkat Kinerja Program	71	PPS	1	Terwujudnya cost effectivnes	1	Tingkat Kinerja Program	70	PPS
2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2	Penilaian Kewajaran	A	Peringkat	2	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	2	Penilaian Kewajaran	A	Peringkat
3	Terwujudnya Kepuasan Pelanggan	3	Indeks Survey Pelanggan	71	Persen	3	Terwujudnya Kepuasan Pelanggan	3	Indeks Survey Pelanggan	70	Persen
		4	Ketepatan antrian pelayanan	65	Hari			4	Ketepatan antrian pelayanan	30	Hari
4	Terwujudnya Cakupan Kalibrasi	5	Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan	560	Unit	4	Terwujudnya Cakupan Kalibrasi	5	Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan	15	Persen

5	Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan	6	Tingkat kelaikan alkes	95	Persen	5	Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan	6	Tingkat kelaikan alkes	95	Persen
6	Terpenuhinya Standar Internasional	7	Jumlah Lingkup akreditasi	27	Lingkup Akreditasi	6	Terpenuhinya Standar Internasional	7	Jumlah Lingkup akreditasi	25	Lingkup Akreditasi
		8	Penambahan Jenis layanan	67	Jumlah Alat			8	Penambahan Jenis layanan	50	Persen
7	Terbinanya kemitraan dengan pelanggan	9	Jumlah Fasyankes Teredukasi	68	Jumlah	7	Terbinanya kemitraan dengan pelanggan	9	Jumlah Fasyankes Teredukasi	10	Persen
8	Terwujudnya Pemantauan Mutu Eksternal	10	Jumlah Peserta PME	12	Jumlah	8	Terwujudnya Pemantauan Mutu Eksternal	10	Jumlah Peserta PME	10	Persen
9	Terwujudnya inovasi layanan	11	Jumlah Mitra Layanan	3	Jumlah	9	Terwujudnya inovasi layanan	11	Jumlah Mitra Layanan	2	Buah
10	Terbangunnya budaya laboratorium yang unggul	12	Metode Kerja tervalidasi	50	Jumlah	10	Terbangunnya budaya laboratorium yang unggul	12	Metode Kerja tervalidasi	35	Dokumen
		13	Rasio SDM berkinerja produktif	78	Persen			13	Rasio SDM berkinerja produktif	65	Persen
11	Terwujudnya kompetensi SDM	14	Kompetensi petugas pengujian dan kalibrasi	72	Persen	11	Terwujudnya kompetensi SDM	14	Kompetensi petugas pengujian dan kalibrasi	85	Persen
12	Terwujudnya sarana dan prasarana	15	Tingkat keandalan sarana prasarana	19	OEE	12	Terwujudnya sarana dan prasarana	15	Tingkat keandalan sarana prasarana	70	Persen
13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	16	Kematangan tata kelola TI	1	COBIT	13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	16	Kematangan tata kelola TI	1	COBIT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam kurun waktu Januari-Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat pencapaian keberhasilan masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna .

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja juga dimaksud untuk mengetahui kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surabaya yang telah ditetapkan. Sasaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya cost effectiveness.
2. Terwujudnya akuntabilitas anggaran.
3. Terwujudnya kepuasan pelanggan.
4. Terwujudnya cakupan kalibrasi.
5. Terwujudnya keamanan fasilitas kesehatan.
6. Terpenuhi standar internasional.
7. Terbinanya kemitraan dengan pelanggan.
8. Terwujudnya pemantauan mutu eksternal.
9. Terwujudnya mitra layanan.
10. Terbangunnya budaya laboratorium yang unggul.
11. Terwujudnya kompetensi SDM.
12. Terwujudnya sarana prasarana.
13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi.

Indikator pencapaian sasaran berasal dari Rencana Strategis yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja program.
2. Penilaian Kewajaran.
3. Indeks survey pelanggan.
4. Tingkat kecepatan antrian.
5. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan.
6. Tingkat kelayakan alat kesehatan.
7. Tingkat perluasan lingkup akreditasi.
8. Tingkat pemenuhan alat sesuai tupoksi.
9. Tingkat pertumbuhan asyankes tereduksi.
10. Tingkat pertumbuhan pemantauan mutu eksternal.

-
11. Jumlah satelit layanan.
 12. Metode kerja tervalidasi.
 13. Rasio SDM berkinerja produktif.
 14. Kompetensi petugas pengujian dan klabrasi.
 15. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.
 16. Kematangan tata kelola IT.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab unit organisasi. Uraian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kinerja Program

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Pengiriman Surat
- c. Penambah daya Tahan Tubuh
- d. Honor Penanggungjawab Kegiatan
- e. Operasional Pemeliharaan Perkantoran
- f. Pakaian Dinas Pegawai
- g. Pertemuan/Jamuan/Representasi
- h. Transport Lokal
- i. Keperluan Perkantoran
- j. Perawatan Roda 2/4
- k. Pemeliharaan Inventaris Kantor
- l. Langganan Daya dan Jasa
- m. Honorarium Satpam, Pengemudi dan Pramubakti
- n. Operasional Perjalanan Pimpinan
- o. Perawatan Sarana Gedung

-
- p. Honor Penanggungjawab Kegiatan
 - q. Pertemuan SIMKA
 - r. Konsultasi SIMKA
 - s. Laporan Pemeriksaan Resiko Pekerjaan
 - t. Operasional Pemeliharaan Perkantoran
 - u. Rakerkosda 8 (Delapan) Provinsi Ilyah Kerja BPFK Surabaya

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 9.339.907.000,- dengan target 71 PPS pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 8.195.296.910,- dengan pencapaian hasil 62 PPS.

2. Penilaian Kewajaran

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pertemuan RKA-KL
- b. Pertemuan E-Planning
- c. Konsultasi E-Planning
- d. Pertemuan dalam Rangka Pembahasan SAK & BMN
- e. Pelaksanaan Penagihan Pengujian Kalibrasi dan Paparan Radiasi
- f. Pengelolaan Anggaran PNBK
- g. Pertemuan LAKIP & Laporan Tahunan
- h. Konsultasi LAKIP & Laporan Tahunan
- i. Pertemuan dalam Rangka Pembahasan PNBK
- j. Konsultasi PNBK
- k. Konsultasi Pengadaan

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 946.228.000,- dengan target A Peringkat pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 450.647.870,- dengan pencapaian hasil A Peringkat

3. Indeks Survey Pelanggan

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Service Excellence
- b. Kegiatan survey kepuasan pelanggan

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 419.750.000,- dengan target 71 Persen pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 339.009.500,- dengan pencapaian hasil 57 Persen.

4. Ketepatan Antrian Pelayanan

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Temu Pelanggan Pelayanan BPFK Surabaya di Jawa Timur

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 254.950.000,- dengan target 65 Hari pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 134.170.000,- dengan pencapaian hasil 34 Hari.

5. Tingkat pertumbuhan cakupan layanan

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Penyiapan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan
- b. Program Inspeksi Listrik Medis (RS, PKM)
- c. Program Kalibrasi Surveymeter di 8 (Delapan) Provinsi
- d. Pengujian dan Kalibrasi RS & PKM (DTPK, PDBK & Belum Pernah)
- e. Program Investigasi

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 1.153.654.000,- dengan target 560 Unit pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 636.108.470,- dengan pencapaian hasil 309 Unit.

6. Tingkat Kelaikan alat Kesehatan

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Kegiatan Assesment fasyankes 8 (Delapan) Provinsi di Rumah Sakit & Puskesmas
- b. Program Peningkatan Fasyankes (Quality Control)
- c. Pendampingan Mutu Pengelolaan Fasyankes

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 404.707.000,- dengan target 95 Persen pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 282.882.100,- dengan pencapaian hasil 66 Persen.

7. Jumlah Lingkup Akreditasi

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Kegiatan Akreditasi Laboratorium
- b. Kegiatan Kaji Ulang Manajemen bidang Teknis di Jawa Timur
- c. Kegiatan Kaji Ulang Manajemen di Jawa Timur
- d. Kegiatan Audit Internal

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 272.612.000,- dengan target 27 Lingkup Akreditasi pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 106.515.900,- dengan pencapaian hasil 11 Lingkup Akreditasi.

8. Penambahan Jenis Layanan.

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Alat Kedokteran, Kesehatan
- b. Laboratorium Kelas 2

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 11.834.670.000,- dengan target 67 Jumlah Alat pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 9.974.756.000,- dengan pencapaian hasil 56 Jumlah Alat.

9. Jumlah Fasyankes Teredukasi

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pendampingan Mutu Fasilitas Kesehatan
-

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 153.768.000,- dengan target 68 Jumlah pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 153.278.000,- dengan pencapaian hasil 68 Jumlah.

10. Jumlah Peserta PME

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Program PME/Uji Banding Bidang Sarana Kesehatan di Jakarta
- b. Pertemuan seminar Teknis Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 534.365.000,- dengan target 12 Jumlah pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 413.992.780,- dengan pencapaian hasil 9 Jumlah.

11. Jumlah Mitra Layanan

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Program pendampingan Teknis sister Laboratory
- b. Executive meeting jawa Timur- Koordinasi Program sister Laboratory pengujian alat Kesehatan
- c. Program pendampingan sister laboratorium
- d. Workshop penyiapan laboratorium pengujian alat kesehatan
- e. Penetapan sister laboratorium di jakarta
- f. Peningkatan kemampuan SDM sister laboratorium bidang teknis

g. Pendampingan penyiapan laboratorium pengujian alat kesehatan

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 906.492.000,- dengan target 3 Jumlah pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 699.699.000,- dengan pencapaian hasil 2 Jumlah.

12. Metode Kerja Tervalidasi

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

a. Kegiatan penyusunan MK/IK/LK

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 394.900.000,- dengan target 50 Jumlah pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 118.667.000,- dengan pencapaian hasil 15 Jumlah.

13. Rasio SDM berkinerja produktif

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

a. Interkomparasi instalasi laboratorium instalasi PPDP di Jawa Timur

b. Konsultasi sebagai lembaga rujukan pengujian/kalibrasi

c. Interkomparasi instalasi laboratorium instalasi KAUR

d. Interkomparasi instalasi laboratorium instalasi PRUK

e. Interkomparasi instalasi laboratorium instalasi KAK

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 615.335.000,- dengan target 78 Persen pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 365.672.700,- dengan pencapaian hasil 46 Persen.

14. Kompetensi Petugas pengujian dan Kalibrasi

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pelatihan PPR
- b. Peningkatan SDM
- c. Peningkatan SDM (In House Training)
- d. Study banding untuk peningkatan kemampuan SDM
- e. Magang kalibrasi alat kesehatan
- f. Requalifikasi petugas proteksi radiasi di Bapeten
- g. Pertemuan dalam rangka jabatan fungsional
- h. Peningkatan SDM Fasyankes
- i. Workshop bidang teknis

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 1.423.173.000,- dengan target 72 Persen pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 569.928.000,- dengan pencapaian hasil 29 Persen.

15. Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana.

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Belanja Operasional Penunjang Laboratorium
- b. Pemeliharaan Alat laboratorium

c. Kegiatan Rekalibrasi

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 1.702.268.138,- dengan target 19 OEE pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 728.908.138,- dengan pencapaian hasil 8 OEE.

16. Kematangan tata kelola IT

Untuk mencapai indikator tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan :

Sasaran indikator/kegiatan :

- a. Pengadaan sistem informasi.

Permasalahan :

Pada indikator kinerja berikut, BPFK Surabaya belum mengalami kendala yang berarti.

Anggaran :

Dari Anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan target 1 COBIT pada indikator kinerja tersebut dicapai realisasi anggaran sebesar Rp 288.185.700,- dengan pencapaian hasil 1 COBIT.

B. SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kekuatan Sumber Daya Manusia dari BPFK Surabaya tahun 2016 adalah sejumlah 83 (Delapan Puluh Tiga) orang dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) Orang.
- b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sejumlah 12 (Dua Belas) Orang.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Sumber daya anggaran tahun 2016 bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp 21.808.999.000,- yang terdiri dari:

1. Dana bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 18.119.467.000,- terdiri dari:
 - a. Belanja Operasional Pegawai Rp 7.443.319.000,-
 - b. Belanja Operasional Barang Rp 5.876.148.000,-
 - c. Belanja Modal Rp 4.800.000.000,-
2. Dana bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.689.532.000,- terdiri dari:
 - a. Belanja Operasional Pegawai Rp 0,-
 - b. Belanja Operasional Barang Rp 3.168.642.000,-
 - c. Belanja Modal Rp 520.890.000,-

Untuk alokasi dana/sumber daya anggaran tersebut dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Tabel 3 : Alokasi Sumber Daya Anggaran

KODE	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan		21.808.999.000
2051	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan		
2051.003	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	18 Unit	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		190.890.000
2051.004	Alat pengujian dan kalibrasi [Base Line]	51 Unit	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.800.000.000
2051.007	Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang Sarana dan Prasarana dan peralatan kesehatan	11 Laporan	
521211	Belanja Bahan		5.922.000
521219	Belanja Barnag Non Operasional Lainnya		1.356.959.000
522151	Belanja Jasa Profesi		11.200.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		347.070.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		900.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		7.967.000
2051.008	Laporan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis/BPFK	1 Laporan	
521211	Belanja Bahan		31.324.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		47.099.000
522141	Belanja Sewa		3.700.000
522151	Belanja Jasa Proesi		36.400.000
524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri		69.192.000
2051.011	Operasional Unit Fungsional UPT	12 Bulan layanan	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		329.682.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		300.960.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos dan Pusat		162.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		63.000.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		41.550.000
521211	Belanja Bahan		52.595.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.800.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		33.427.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		335.863.000
522141	Belanja Sewa		3.000.000

522151	Belanja Jasa Profesi		68.600.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		152.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		200.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		993.585.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		398.780.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		13.200.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		18.600.000
2051.012	Dokumen perencanaan dan anggaran	1 Dokumen	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		181.130.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		24.480.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		91.000.000
2051.014	Sistem Informasi Manajemen	1 Sistem aplikasi	
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan		330.000.000
2051.015	N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	7 Dokumen	
521211	Belanja Bahan		118.368.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		169.750.000
522141	Belanja Sewa		18.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi		77.200.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		266.440.000
524111	Belanja Perjalana Biasa		370.512.000
2051.017	SDM yang Ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya	9 Laporan	
521211	Belanja Bahan		30.132.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		596.340.000
522141	Belanja Sewa		9.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi		68.800.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		646.548.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		46.200.000
2051.022	Laporan Teknis	7 Laporan	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		57.486.000
524111	Belanja Perjalanaan Biasa		231.845.000
2051.024	Manajemen Pendukung	1 Paket	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		59.135.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		534.027.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		277.722.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		84.300.000
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan	12 Bulan Layanan	
2094.994	Layanan Perkantoran		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		2.921.406.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		100.000
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS		261.183.000
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS		79.894.000
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS		44.460.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		454.675.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS		153.815.000
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS		232.521.000
511129	Belanja Uang Makan PNS		609.840.000
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS		307.842.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		118.785.000
512211	Belanja Uang Lembur		122.832.000
521111	Belanja keperluan perkantoran		379.620.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		138.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		51.600.000
522111	Belanja Langganan Listrik		600.000.000
522112	Belanja langganan Telepon		75.162.000
522113	Belanja langganan Air		12.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		289.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		498.436.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa		92.148.000

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPFK Surabaya didukung sumber daya sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4 : Sumber Daya Sarana dan Prasarana

KODE	URAIAN	KUANTITAS	KONDISI			NILAI
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
132111	PERALATAN DAN MESIN	4276	4276	0	0	50.545.228.614
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	7	6	0	1	2.491.577.380
135121	ASET TETAP LAINNYA	336	336	0	0	109.189.207
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	16	0	0	16	122.528.760
162151	SOFTWARE	3	3	0	0	89.350.000
162191	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	3	3	0	0	467.125.202
136111	KONSTRUKSI DALAM PROSES	1	1	0	0	599.772.000
		4642				54.424.771.163

Sumber daya sarana dan prasarana atau Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki BPFK Surabaya adalah sebagaimana pada dokumen Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2016. Barang Milik Negara (BMN) Intrakomtabel BPFK Surabaya per 31 Desember 2016 bernilai nominal sebesar Rp 54.424.771.163,- dengan uraian per kelompok barang sebagai berikut:

- a. Peralatan dan Mesin, dengan kode kelompok barang 132111, sejumlah 4.276 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 50.545.228.614,-
- b. Gedung dan Bangunan, dengan kode kelompok barang 133111, sejumlah 7 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 2.491.577.380,-
- c. Aset tetap lainnya, dengan kode kelompok barang 135121, sejumlah 336 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 109.189.207,-
- d. Aset tetap yang tidak digunakan, dengan kode kelompok barang 166112, sejumlah 16 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 122.528.760,-
- e. Software, dengan kode kelompok barang 162151, sejumlah 3 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 89.350.000,-

-
- f. Aset tak berwujud lainnya, dengan kode kelompok barang 162191, sejumlah 3 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 89.350.000,-
 - g. Konstruksi dalam proses, dengan kelompok barang 136111, sejumlah 1 unit dengan nilai nominal sebesar Rp 599.722.000,-

BAB IV

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini secara umum menunjukkan pencapaian kinerja selama tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPFK Surabaya. BPFK Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Adapun sasaran strategis dari BPFK Surabaya berdasarkan tugas pokok tersebut di atas adalah :

1. Terwujudnya cost effectiveness.
2. Terwujudnya akuntabilitas anggaran.
3. Terwujudnya kepuasan pelanggan.
4. Terwujudnya cakupan kalibrasi.
5. Terwujudnya keamanan fasilitas kesehatan.
6. Terpenuhi standar internasional.
7. Terbinanya kemitraan dengan pelanggan.
8. Terwujudnya pemantauan mutu eksternal.
9. Terwujudnya mitra layanan.
10. Terbangunnya budaya laboratorium yang unggul.
11. Terwujudnya kompetensi SDM.
12. Terwujudnya sarana prasarana.
13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi.

Adapun indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut adalah berupa output-output dari pelaksanaan program yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam kegiatan-kegiatan pelayanan pengujian/kalibrasi.

Tingkat capaian realisasi anggaran tahun 2016 direncanakan Rp 21.808.999.000,- terealisasi sebesar 15.724.441.558,- atau dengan tingkat capaian serapan 72,10 %.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tujuan organisasi di BPFK Surabaya, melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, perealisasiian kegiatan secara lebih terkoordinasi dengan baik.

B. Saran

Upaya dan strategi yang mungkin dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di BPFK Surabaya disarankan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan menjadi satker BLU.
2. Perealisasiian anggaran secara terencana pada masing-masing kegiatan.
3. Memaksimalkan kinerja SDM yang ada untuk mengatasi kekurangan jumlah.
4. Pengusulan anggaran kebutuhan sarana dan prasarana.
5. Koordinasi pelayanan dengan instansi terkait.
6. Pengusulan perubahan tarif.
7. Pengusulan anggaran untuk perbaikan dan recalibrasi sesuai kebutuhan.
8. Pemberian pelatihan secara berkesinambungan terhadap masing-masing pegawai.
9. Melakukan sosialisasi pelayanan.

Demikian laporan ini dibuat , kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2016 BPFK Surabaya dapat terselesaikan.

